

Kesetaraan Sosial: Pilar Keempat Administrasi Publik

Wooldridge Biru¹ dan Betsy Bilharz² ¹ Sekolah Pemerintahan dan Urusan Masyarakat L. Douglas Wilder, Universitas Virginia Commonwealth, Richmond, VA, AS

² Kandidat MPA, Sekolah Pemerintahan dan Administrasi Publik Wilder, Universitas Virginia Commonwealth, Richmond, VA, AS

Kesetaraan Sosial: Ikhtisar

Hari ini ' Di dunia yang semakin memecah belah, isu ketimpangan menjadi pusat perdebatan kebijakan dan frustrasi publik terkait berbagai masalah sosial. Kesenjangan pendapatan yang semakin lebar, akses yang tidak setara ke sumber daya kesehatan dan pendidikan, dan ketegangan antara kelompok ras dan sosial berada di garis depan percakapan, khususnya untuk badan publik yang ingin menyelesaikannya. Untuk membahas masalah ini dengan tepat, ada baiknya untuk membahasnya kembali fl ect pada sejarah dan evolusi konsep ekuitas, mengapa itu menjadi perhatian administrator publik, dan contoh konsekuensi negatif yang dapat disebabkan dan diperbaiki fi diedit oleh negara. Dengan mengkaji konteks keadilan sosial

percakapan, administrator publik mungkin lebih memahami bagaimana mengurangi ketidakadilan di masyarakat.

Evolusi Kesetaraan Sosial

Meskipun pertanyaan tentang keadilan tetap lebih relevan dari sebelumnya, diskusi tentang keadilan sosial sebagai sebuah konsep telah didokumentasikan sejauh Aristoteles dan Plato (Rutledge 2002). Keduanya membahas pentingnya keadilan sebagai jenis keadilan di antara manusia yang mungkin " melampaui hukum tertulis " dan dapat berkembang sebagai praktik (Rutledge 2002). Meski ada aturan, Rousseau mengemukakan, distribusi yang tidak merata dan kebutuhan ekonomi menciptakan ketimpangan alam dan perbedaan itu " menjadi lebih permanen dalam efeknya "(Rousseau 1992). Cita-cita dasar keadilan dan kesetaraan inilah yang menjadi asal muasal Amerika Serikat. Frustrasi oleh ketidakadilan politik dan sosial, para penjajah awal de fi ned dalam Deklarasi Kemerdekaan itu " semua manusia diciptakan sama "(Johnson dan Svava 2011). Tahun 1960-an dan 1970-an mengamati lompatan dramatis dalam penerapan keadilan sosial di fi bidang administrasi publik (Wooldridge dan Gooden

2009). Konteks nasional dekade ini berpusat pada ketidakadilan rasial dan hak-hak sipil, menyoroti ketidakadilan pengalaman dengan pemerintah dan institusi untuk orang Amerika yang berbeda berdasarkan kelompok identitas mereka. Frustrasi dengan pengamatannya terhadap pendekatan dan kontra yang ketinggalan zaman

Ketimpangan antara kaya dan miskin adalah yang tertua dan paling banyak ayat-ayat di antara ilmuwan politik, Dwight

penyakit fatal semua republik. Plutarch, 46-120 M.

Waldo berusaha mengumpulkan yang lebih muda, lebih

kelompok administrator publik yang dinamis untuk membahas masalah penting di Syracuse, New York, untuk fi Konferensi Minnowbrook pertama pada tahun 1968 (Wooldridge dan Gooden 2009). Konferensi tersebut berfungsi sebagai dasar untuk cita-cita Administrasi Publik Baru, yang menolak dikotomi Wilsonian dan mengakui pentingnya administrator dalam menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menegakkan dan fi pengaruh (Johnson dan Svava 2011).

Peran administrator dalam mempromosikan keadilan sosial semakin solidi fi diedit oleh Rawls ' pekerjaan seminal 1971, " Teori Keadilan, " di mana dia menggambarkan pentingnya penciptaan institusi dan kebijakan yang mempromosikan masyarakat yang adil dan adil bagi mereka yang berada di bawah (Rawls 1971). Di

1990, sarjana keadilan sosial terkemuka H. George Frederickson mengusulkan dimasukkannya ekuitas sebagai a " pilar ketiga " bersama ekonomi dan ef fi efisiensi sebagai nilai sentral bagi administrator; Di bawah filosofi ini, administrator publik fokus tidak hanya pada apakah suatu program atau kebijakan bekerja tetapi untuk siapa program atau kebijakan tersebut bekerja - sebuah konsep yang disebut Frederickson sebagai " pertanyaan kedua "(Frederickson 1990). Shafritz dan Russell berpendapat bahwa administrator publik ditugasi tidak hanya untuk mengelola undang-undang secara adil dan adil tetapi juga mempromosikan kesetaraan melalui mempertahankan tenaga kerja yang beragam dengan peluang yang sama dan memberikan kepemimpinan moral dan inspirasi bagi warga negara untuk berperilaku adil (Shafritz et al. 2007).

Baru-baru ini, konsep keadilan sosial telah diperluas untuk mencakup lebih banyak kategori daripada ras dan jenis kelamin, termasuk identitas seksual dan gender, status ekonomi, cacat fisik dan mental, dan banyak lagi (Frederickson 2005). Ketidakadilan itu sendiri telah cenderung menjauh dari bentuk-bentuk diskriminasi yang lebih terbuka seperti yang disaksikan pada tahun 1960-an dan lebih ke arah disparitas yang halus dalam akses dan dampak yang membatasi partisipasi politik dan fi pengaruh, mengarahkan respons politik ke lebih af fi kelompok yang berpengaruh (Frederickson 2005). Saat ini, 10% teratas dari orang Amerika menghasilkan 90% negara ' pendapatan. Baru-baru ini, Johnson dan Svava (2011) pro-

Ekuitas Sosial Didefinisikan

Padahal keadilan sosial memiliki banyak de teknis fi nisi, esensi fundamentalnya bermuara pada nilai-nilai keadilan dan keadilan yang luas; sebagai Hart (1974) mengutip dari Black ' Kamus Hukum, [keadilan] menunjukkan semangat dan kebiasaan keadilan, keadilan, dan kesepakatan yang benar yang akan mengatur hubungan antara laki-laki dengan laki-laki - aturan melakukan untuk semua orang lain seperti yang kita inginkan mereka lakukan untuk kita. " Mirip de fi Judul ekuitas meliputi: Rawls ' teori " keadilan sebagai keadilan "(1971); Adler ' s de fi definisi keadilan sosial sebagai " perlakuan yang sama yang semua berhak karena menjadi manusia "(Adler 1981); dan Falk ' Deskripsi ekuitas sebagai " ketidakberpihakan, keadilan, dan keadilan "(Falk et al. 1993). Lebih banyak lagi " kompleks " de fi nisi memperluas konsep keadilan sosial dan menerapkannya pada hak publik, akses, dan kebijakan redistribusi (Svava dan Brunet 2005). Bank Dunia menggambarkan ekuitas sebagai " akses yang sama ke peluang yang memungkinkan orang untuk mengejar kehidupan pilihan mereka sendiri dan untuk menghindari deprivation ekstrim dalam hasil "(2006).

Panel Tetap tentang Kesetaraan Sosial dalam Pemerintahan Akademi Administrasi Publik Nasional (NAPA) de fi nes keadilan sosial sebagai

" Manajemen yang adil, adil dan merata dari semua institusi yang melayani publik secara langsung atau melalui kontrak, dan distribusi layanan publik yang adil dan merata, dan implementasi kebijakan publik, dan komitmen untuk mempromosikan keadilan, keadilan, dan kesetaraan dalam pembentukan publik kebijakan. " Nanti dalam rencana strategisnya, NAPA identi fi keadilan sosial sebagai pilar keempat dari administrasi publik. Sasaran 2 dari rencana ini menyatakan:

Akademi ' s Dewan Direksi mengadopsi keadilan sosial sebagai pilar keempat dari administrasi publik, bersama dengan ekonomi, ef fi efisiensi dan efektivitas. (NAPAWash 2000)

Baru-baru ini, Johnson dan Svava (2011) pro-berpose de baru fi definisi keadilan sosial. " Kesetaraan Sosial adalah komitmen aktif terhadap keadilan, keadilan, dan kesetaraan dalam perumusan kebijakan publik, distribusi pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan publik, dan pengelolaan semua lembaga yang melayani publik secara langsung oleh

kontrak. Administrator publik, termasuk semua orang yang terlibat dalam pemerintahan publik harus berusaha untuk mencegah dan mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan berdasarkan signifi-kan karakteristik sosial yang tidak bisa dan untuk mempromosikan kesetaraan yang lebih besar dalam akses ke layanan, keadilan prosedural, kualitas layanan dan hasil sosial (hal. 282). " Meskipun ada perbedaan kecil dalam de-ri Intinya, deskripsi ini meringkas inti dari konsep keadilan sosial untuk administrator publik.

Ketimpangan merusak kepercayaan dan komunitas. Itu membuat pemerintah rentan terhadap kepentingan khusus yang berusaha memaksimalkan pro- jangka pendek fi t. Ketimpangan, terutama ketimpangan yang meningkat, mendorong persaingan status dan perpecahan sosial, serta melemahkan keinginan banyak orang untuk berorganisasi guna mempertahankan kepentingan bersama melawan kepentingan khusus segelintir orang. Ketimpangan merusak ikatan sosial, mengikis persahabatan, mengurangi partisipasi sipil, dan melemahkan kepercayaan pada pemerintah.

Mengapa Konsep Ini Menjadi Perhatian bagi Administrator Publik

Charles Darwin terkenal berkomentar di awal abad kesembilan belas, " Jika kesengsaraan orang miskin bukan disebabkan oleh hukum alam, tetapi oleh institusi kita, besar dosa kita " (Woolley dan Gooden 2009).

Baru-baru ini, Liga Kota Nasional menyatakan:

Pemerintah di semua tingkatan ikut bertanggung jawab atas banyak ketidaksetaraan mencolok yang kita lihat saat ini dan oleh karena itu harus memimpin jalan ke solusi. Kebijakan publik yang diadopsi dari waktu ke waktu di tingkat federal, negara bagian, dan lokal telah menciptakan dan memperburuk banyak ketidaksetaraan yang dihadapi komunitas kita saat ini. (ESENSI: Laporan Futures 2003 Membagi Kita Jatuh: Ketimpangan dan Masa Depan Amerika ' Kota dan Kota, Liga Kota Nasional, 2003)

Menanggapi persepsi ini, Liga menciptakan Upaya Ekuitas dan Inklusivitas yang menyatakan:

Menciptakan komunitas yang adil dan inklusif dengan peluang untuk semua dapat mengarah pada permainan yang setara fi bidang di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk sukses. National League of Cities sedang menjajaki bagaimana kebijakan pemerintah di semua tingkatan telah berkontribusi pada peningkatan ketidaksetaraan di Amerika ' Kota-kota besar dan kecil yang mengancam kesejahteraan daerah dan bangsa. Pembagian berdasarkan ras, kelas dan geografi telah menurunkan akses ke pekerjaan yang sangat dibutuhkan, perawatan kesehatan yang memadai, perumahan yang terjangkau, dan pendidikan yang berkualitas. Melalui kampanye kepemimpinan, penelitian dan publikasi, lokakarya dan seminar, serta prioritas advokasi, Liga Nasional Kota membantu penduduk lokal fi Para pejabat menciptakan rasa kebersamaan dan menjadi pendukung kepercayaan dan andal untuk kesejahteraan semua warga. (http://www.nlc.org/topik/index.aspx?SectionID=equity_inclusive

ness)

Bagaimana Mengukur Kesetaraan Sosial

Jika fi Langkah pertama bagi administrator melibatkan pembentukan de dasar fi Untuk memahami keadilan sosial, yang melibatkan pengukuran kinerja dan hasil untuk menilai dan mengenali ketidakadilan. Dengan mulai menggambarkan ketidakadilan melalui ukuran kuantitatif, administrator dapat mulai mengembangkan tolok ukur penilaian kinerja (Rutledge 2002). Ada beberapa ukuran untuk menetapkan nilai numerik ke derajat ekuitas. Itu fi pertama, dan paling dikenal secara luas dalam skala internasional, adalah kopi Gini fi ukuran ketidaksetaraan pendapatan yang efisien (Glaeser et al. 2011). Kopi Gini fi cient merepresentasikan distribusi kekayaan dalam sebuah komunitas, dengan 0 merepresentasikan distribusi yang merata dan 1 merepresentasikan seluruh kekayaan di tangan satu individu (Glaeser et al. 2011).

Di Amerika Serikat, koefisien Gini 2015 fi cient sebesar 0,482 menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan yang stabil sejak tahun 1970-an fi angka 0,406 (Bank Dunia 2016). Peningkatan pesat secara nasional pada tahun 2000-an dapat dikaitkan dengan tarikan ke atas dari 1% penerima pendapatan teratas; jika orang-orang yang sangat kaya ini dikeluarkan dari perhitungan, kurva menjadi banyak fi atter, meski masih kembali fi Mempengaruhi kesenjangan pendapatan yang semakin lebar (Kenworthy dan Smeeding

2013). Perbedaan ini diperkuat oleh ukuran kemiskinan relatif di AS dari waktu ke waktu, yang merepresentasikan ketidaksetaraan pendapatan di bagian bawah distribusi pendapatan dan telah meningkat secara perlahan tapi pasti selama 99% selama beberapa dekade terakhir (Kenworthy dan Smeeding 2013). Daerah metropolitan menunjukkan kopi Gini yang tinggi fi cient dibandingkan dengan lebih banyak daerah pedesaan, terutama karena kumpulan pekerja terampil dan keragaman ras di dalamnya

kota (Glaeser et al. 2011). Di Amerika Serikat, koefisien Gini tertinggi bisa ditemukan di Miami dan New Orleans pada 0,5744, setara dengan negara Zambia (Stilwell dan Lu 2015). Padahal populasinya 'Kurva Lorenz memberikan pengukuran yang mungkin paling dikenal luas, ketidaksetaraan juga dapat diidentifikasi berdasarkan nilai numerik lainnya. Sumber dan dimensi data yang berbeda dapat dikompilasi dan diberi bobot untuk membuat satu indikator ketidaksetaraan multidimensi dan kemiskinan (Seth et al. 2014). Aplikasi terbaru dari teknik ini menggabungkan indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (tahun sekolah, sanitasi, listrik, gizi anak, dll.) Untuk menghitung skor kekurangan untuk setiap individu, yang kemudian dapat diringkas dan dibandingkan untuk memeriksa perbedaan di antara kelompok, komunitas, dan wilayah geografis (CEPAL 2015).

\ Kesetaraan sosial dalam Government Standing Panel dari National Academy of Public Administration telah memberikan empat kriteria utama yang digunakan untuk mengukur keadilan: keadilan prosedural, akses, kualitas, dan hasil (Johnson dan Svava 2011). Data yang dikumpulkan dari kebijakan dan program dapat menjelaskan berbagai dampak dan pengalaman dalam dimensi ini di berbagai kelompok. Menggunakan contoh perawatan kesehatan yang diberikan oleh Hug (2011): indikator akses mencakup perlindungan asuransi dan penggunaan kunjungan dokter rutin, kunjungan darurat rumah sakit, dan pemeriksaan gigi; ukuran kualitas termasuk manajemen penyakit, perawatan pencegahan seperti vaksinasi, dan kepuasan secara keseluruhan dengan dokter; keadilan prosedural dapat ditunjukkan dengan jumlah rujukan ke spesialis dan peringkat perawatan yang berpusat pada pasien; dan akhirnya, hasil keseluruhan bisa kembali terpengaruh dalam data tentang angka kematian, penyakit jantung, dan kanker. Jika ada perbedaan besar antara kelompok dalam pengukuran hasil, ada kemungkinan yang adil bahwa hambatan ekuitas telah terjadi di satu atau lebih kategori lain (Johnson dan Svava 2011). Seperti yang dicatat oleh Hug, mengakses dan menganalisis data yang tepat menurut kelompok mungkin terbukti menantang, tetapi mengidentifikasi disparitas dalam kinerja tetap menjadi tantangan

fi langkah pertama untuk mencapai hasil yang adil (2011). Data kuantitatif seperti yang dijelaskan dalam contoh layanan kesehatan dapat memberikan komponen penting untuk menilai suatu lembaga 'kinerja dalam mencapai kesetaraan sosial dan sering menjadi persyaratan pelaporan untuk departemen di bawah Pemerintah dan

Performance Results Act of 1993. Namun penting untuk tidak mengabaikan pentingnya tanggapan kualitatif atau diskusi tentang keadilan sosial di lembaga tersebut 'tingkat kepemimpinan (Gooden 2014). Sebuah lembaga dapat berkomitmen untuk memeriksa perbedaan ras dalam layanan dan hasil dan kemudian mengumpulkan perspektif yang berbeda dari pemangku kepentingan untuk memutuskan secara kolektif tentang pendekatan metodologis terbaik (Gooden 2014).

Pemerintah 's Peran dalam Menyelesaikan dan Berkontribusi pada Ketiimpangan

Konsekuensi dari keadilan sosial bisa jadi terlalu besar untuk diabaikan, dengan alasan campur tangan pemerintah. Sepanjang sejarah, beberapa kebijakan penting dan keputusan yudisial telah membantu membentuk peran pemerintah dalam menangani ketidakadilan sosial. Konteks budaya tahun 1960-an yang menginspirasi fi Konferensi Minnowbrook pertama juga mengantarkan keputusan dan kebijakan penting seperti Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal kebangsaan, dan Kennedy 's Perintah Eksekutif 10925, mendirikan af fi tindakan ratifikasi di kalangan pemerintah (Gooden 2014). Satu dekade sebelumnya, pengadilan mengakui bahwa segregasi rasial di sekolah menciptakan akses yang berbeda ke pendidikan dan sumber daya berkualitas tinggi, yang menghasilkan tahun 1954 *Brown v. Dewan Pendidikan* keputusan untuk integrasi sekolah umum (Gooden 2014). Pada saat yang sama, kekhawatiran muncul dengan alasan akses yang tidak setara di antara anak-anak berpenghasilan rendah ke pendidikan, nutrisi, dan layanan kesehatan selama periode kritis perkembangan kognitif awal, memberikan dukungan untuk program Head Start federal (Johnson dan Svava 2011).

Tindakan pemerintah ini hanya memberikan contoh kecil dari keseluruhan contoh pendekatan pemerintah yang mungkin untuk mempromosikan kesetaraan dalam lembaga, program, dan sistem hukum.

Meskipun pemerintah mungkin memainkan peran yang kuat dalam memperbaiki ketidaksetaraan dan ketidakadilan, administrator juga harus berhati-hati bahwa kebijakan semacam itu dapat secara tidak sengaja menimbulkan dampak yang berbeda bagi kelompok yang berbeda. Kemungkinan ketidakadilan yang disebabkan oleh negara ini harus selalu terjadi

dipertimbangkan selama pertimbangan kebijakan dan proses penilaian. Sebagai contoh, file "perang melawan narkoba" yang dideklarasikan oleh Presiden Nixon pada tahun 1970-an menetapkan serangkaian kebijakan penyalahgunaan dan penahanan narkoba yang saat ini merugikan pemerintah lebih dari \$ 51 miliar setiap tahun dan menyumbang lebih dari 1,5 juta penangkapan pada tahun 2014 (Aliansi Kebijakan Narkoba 2015). Meskipun penelitian menunjukkan bahwa orang kulit hitam dan kulit putih menggunakan narkoba pada tingkat yang hampir persis sama, penjara Amerika menerima orang Afrika-Amerika pada tingkat 13,4 kali lebih besar daripada orang kulit putih, dan di beberapa negara bagian kulit hitam mencapai 90% dari narapidana narkoba (Boyd 2011). Ketika orang kulit hitam ditangkap dan dijatuhi hukuman lebih tinggi daripada orang kulit putih untuk pelanggaran terkait narkoba yang sama, dalam jangka panjang

efek dari ini penahanan - dampak ekonomi dari hilangnya kesempatan kerja, pencabutan hak politik sebagai penjahat - juga didistribusikan secara tidak proporsional oleh ras (Brunet 2011). Dampak yang berbeda dari kebijakan obat hukuman untuk pria Afrika-Amerika telah menjadi begitu parah sehingga American Civil Liberties Union merujuk pada kebijakan perang narkoba sebagai

"Jim Crow yang baru" (Boyd 2011).

Ketidakadilan yang disebabkan oleh negara juga dapat diamati dalam bidang kebijakan pendidikan. Meskipun Brown v. Dewan Pendidikan kasus mengintegrasikan sekolah umum dan secara teoritis memulihkan akses, data menunjukkan bahwa kesenjangan masih ada dalam akses dan hasil minoritas terkait dengan pendidikan (Stiefel et al. 2011). Secara historis, sekolah terutama didanai melalui pendapatan pajak daerah yang dilengkapi dengan alokasi dana negara. Berdasarkan sistem ini, sekolah pinggiran kota yang kaya menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi, sementara komunitas yang lebih miskin dapat mencurahkan lebih sedikit sumber daya dan lebih sedikit uang untuk sekolah mereka (White 2015). Meskipun pendanaan negara bagian dimaksudkan untuk meratakan perbedaan ini, penelitian terbaru oleh Mosenkis di sekolah Pennsylvania menunjukkan bahwa, sementara distrik miskin menerima lebih banyak dana negara untuk pendidikan, distrik dengan proporsi siswa kulit putih yang lebih tinggi menerima dana yang jauh lebih tinggi daripada sekolah dengan siswa minoritas di sekolah. tingkat kemiskinan yang sama (Putih 2015). Kesenjangan pendanaan dan sumber daya ini kembali terjadi dan terpengaruh dalam hasil yang tidak sama. Pada tes standar, siswa Afrika-Amerika dan Hispanik mendapat nilai rata-rata standar penuh

deviasi di bawah rekan kulit putih mereka (Stiefel et al. 2011). Diperkirakan bahwa perbedaan kinerja ini akan sangat berkurang, setidaknya setengahnya, jika anak-anak minoritas mulai masuk taman kanak-kanak atau fi kelas satu dengan tingkat keterampilan bahasa lisan, pra-matematika, pra-membaca, dan pengetahuan umum yang setara dengan anak-anak kulit putih; berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa ketidakadilan ini dimulai lebih awal, menunjukkan bahwa program federal seperti Head Start belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan (Farkas

2003). Lebih lanjut, telah disarankan bahwa guru kulit hitam dan putih cenderung menunjukkan perbedaan dalam menilai perilaku siswa dari ras yang berbeda; guru non-kulit hitam menunjukkan harapan yang lebih rendah untuk siswa kulit hitam dan lebih cenderung merekomendasikan tindakan disipliner yang keras seperti penangguhan untuk siswa kulit hitam mereka (Gershenson 2015). Ini fi Penemuan menunjukkan bahwa distrik sekolah dapat memperoleh manfaat fi t dari persyaratan pelatihan yang lebih ekstensif untuk guru serta kesadaran publik yang lebih luas tentang ketidaksetaraan rasial.

Contoh lain dari ketidakadilan yang disebabkan oleh negara diberikan oleh pendekatan perawatan kesehatan Amerika. Tidak seperti negara lain, Amerika Serikat tidak menjamin perawatan universal (Hug 2011). Meskipun perawatan darurat tersedia untuk semua, akses berkelanjutan ke perawatan kesehatan yang terjangkau, preventif, dan teratur tidak dijamin, dan cakupan serta hasil sangat bervariasi menurut ras (Hug 2011). Minoritas lebih mungkin daripada kulit putih untuk tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan atau menggunakan rumah sakit sebagai sumber perawatan biasa mereka (Laporan Disparitas Perawatan Kesehatan Nasional 2007). Perbedaan ras ini juga diamati dalam rawat inap untuk penyakit yang dapat dikendalikan seperti diabetes atau asma, yang bisa menjadi empat hingga fi lima kali lebih tinggi untuk minoritas daripada kulit putih (Hug 2011). Bukti menunjukkan bahwa perbedaan dalam indikator kesehatan bahkan lebih jelas terlihat di daerah pemukiman yang dipisahkan secara rasial, di mana sumber daya terbatas (Williams dan Collins). 2001).

Kasus untuk Meningkatkan Kesetaraan Sosial: Konsekuensi Ketimpangan

Sejauh ini, bab ini telah meninjau cara-cara di mana administrator dapat mengidentifikasi, mengukur, memeriksa, dan menyelesaikan kemungkinan ketidakadilan sosial

dan hambatan dalam masyarakat, baik yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh negara. Namun, bahkan jika ada ketidakadilan, pertanyaannya tetap mengapa administrator harus peduli? Sejauh mana tanggung jawab pemerintah untuk campur tangan dan mengurangi ketidakadilan? Sejak Amerika ' Pendirian, memprioritaskan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan telah menghadirkan tantangan, dengan Konstitusi memberikan bobot lebih untuk melindungi kebebasan dan kebebasan daripada kesetaraan (Johnson dan Svava 2011). Ketegangan yang melekat antara nilai-nilai ini telah menjadi pusat banyak perdebatan kebijakan, terutama seputar kebebasan berekspresi dan kebebasan mengejar ekonomi. Menempatkan debat ini dalam konteks " empat pilar administrasi publik, " ekuitas kadang-kadang mungkin memerlukan kompromi pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Norman-Major 2012).

Terlepas dari ketegangan ideologis antara kebebasan dan kesetaraan dan perdebatan melawan campur tangan pemerintah, argumen umum atas nama keadilan sosial secara konsisten muncul. Gooden (2014) menjelaskan pemeriksaan organisasi atas keadilan sosial yang dikatalisasi oleh empat pemicu utama: moral, ekonomi, politik, dan hukum. SEBUAH fi Argumen tambahan kelima untuk ekuitas dapat dibentuk atas dasar penipis konflik dan keresahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari ketidakadilan (Wooldridge 2016). Meskipun pendukung kesetaraan sosial dapat memilih untuk menekankan argumen tertentu tergantung pada audiens yang mereka coba bujuk, dukungan penuh untuk kesetaraan sosial adalah kaya dan multidimensi (Norman-Major dan Wooldridge 2011).

Argumen utama untuk keadilan sosial berpusat pada moralitas mempromosikan apa adanya " Baik " dan " adil " (Hart 1974). Seperti yang diasumsikan Rawls sebagai miliknya fi prinsip pertama dalam posisi asli penciptaan masyarakat, " Setiap orang memiliki hak yang sama atas sistem paling luas dari kebebasan dasar yang setara yang kompatibel dengan sistem kebebasan serupa untuk semua " (1974). Hart berpendapat bahwa semua administrator publik harus mengadopsi prinsip ini dengan konsensus untuk mendirikan uni fi pedoman etis yang digunakan untuk memperlakukan warga negara - tidak hanya didasarkan pada altruisme tetapi lebih pada rasa persaudaraan dan ikatan manusia (Hart 1974). Pandangan ini menggemakan pandangan John Locke, yang percaya bahwa individu adalah moral

sama di alam (Frederickson 2005). Jika pendirian moral menyatakan bahwa semua manusia berhak atas rasa keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan dan akses, maka halangan untuk persamaan tersebut harus menjadi perhatian moral (Frederickson 2005). Seperti yang diringkas oleh Frederickson, " Kemiskinan yang terus-menerus dan parah adalah masalah moral yang mendalam, dan keadilan sosial adalah bagian dari pendirian moral tentang masalah itu "(2005). Argumen moral untuk kesetaraan sosial mengilhami undang-undang hak-hak sipil atas dasar bahwa perlakuan buruk terhadap warga negara yang berbeda ras secara inheren " tidak adil " atau " salah "(Gooden 2014). Sepanjang sejarah Amerika, argumen moral untuk kesetaraan mengarah pada penciptaan hukum dan prinsip untuk melindungi kelompok dari penganiayaan dan diskriminasi. Argumen hukum untuk keadilan sosial, oleh karena itu, bergantung pada tanggung jawab administrator dan pembuat kebijakan untuk menegakkan undang-undang dan kebijakan sesuai dengan standar ekuitas yang telah ditetapkan sebelumnya (Gooden 2014). Misalnya, American Civil Liberties Union (ACLU) dan National Association for Advancement of Colored People (NAACP) memiliki fi memimpin keluhan hukum untuk memerangi disparitas rasial, seperti atas nama klien kesejahteraan di Wisconsin yang diberi sanksi secara tidak proporsional oleh ras (Gooden

2014). Dari perspektif ini, administrator harus mempertimbangkan keadilan dalam kebijakan untuk memastikan bahwa dampak layanan tidak melanggar perlindungan hukum yang ada.

Sebagaimana dibahas di atas, banyak kritikus kebijakan yang mempromosikan ekuitas mengutip campur tangan kepentingan ekonomi. Tentu saja, upaya untuk mempromosikan kesetaraan mungkin menantang beberapa kebebasan ekonomi, seperti yang ditunjukkan melalui kebijakan redistribusi pajak, peraturan industri, dan pembatasan lingkungan (Johnson dan Svava). 2011). Meskipun ini terlihat jelas fi Memang, keadilan sosial menghasilkan banyak keuntungan bersih ekonomi fi ts (Norman-Major dan Wooldridge 2011). Terutama, masyarakat yang tidak adil secara statistik menunjukkan pertumbuhan dan kinerja ekonomi yang lebih rendah daripada yang lain (Buss dan Ahmed 2011). Meningkatnya kemiskinan menghambat kemampuan individu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa ' tenaga kerja (Turner 2016). The Kellogg Foundation menyarankan bahwa menutup kesenjangan pendapatan antara pendapatan kulit putih dan minoritas akan

meningkatkan pendapatan AS sebesar 12%, meningkatkan PDB sebesar \$ 1,9 triliun dan menghasilkan lebih dari \$ 290 miliar pendapatan pajak tambahan (Turner 2016). Demikian pula, kemiskinan di masyarakat juga dikaitkan dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi dan hasil kesehatan yang lebih buruk, yang semakin mengurangi produktivitas ekonomi yang seharusnya dapat menghasilkan barang dan jasa bagi perekonomian (Holzer 2007). Biaya bersih kemiskinan bisa menjadi sangat tinggi - dalam banyak kasus, membutuhkan lebih banyak uang fi x dampak negatif daripada mengatasi akar ketidakadilan untuk memulai (Norman-Major dan Wooldridge

2011).

Penyebab ketidakadilan lainnya bersifat politis dan karenanya harus menjadi bagian dari solusi apa pun. Mereka yang memiliki kendali atas sumber daya cenderung menunjukkan yang terkuat fi pengkondisi atas urusan publik. Bartels (2002) menentukan bahwa perilaku voting senator kembali fi responsivitas terhadap af fi konstituen berpengaruh yang tiga kali lebih besar dari konstituen berpenghasilan rendah. Pola ini semakin solidi fi diedit oleh Citizens United v. FEC keputusan, di mana Mahkamah Agung menetapkan bahwa belanja kampanye oleh nonpro fi t korporasi tidak dapat dibatasi karena kebebasan berbicara (SCOTUSblog 2010). Ketidakseimbangan kekuatan politik antar kelompok melanggar prinsip bahwa pemerintah harus mewakili rakyatnya (Gooden 2014). Selanjutnya, ketika individu mempersepsikan dirinya memiliki peringkat yang lebih rendah dalam masyarakat, ini perasaan rendah diri fi Ketakutan dan tidak layak nya tempat mereka dalam masyarakat terwujud dalam partisipasi politik yang lebih rendah, yang selanjutnya merusak kepentingan politik kelompok (Kraus et al. 2015).

Terkait dengan argumen ekonomi dan politik untuk keadilan sosial tetapi layak untuk dibedakan, masyarakat dengan ketidakadilan yang tinggi cenderung mengalami kerugian yang lebih besar. fi ict (Wilkinson 2011). Ketika perasaan ketidakadilan dan pengucilan meliputi suatu budaya, komunitas menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih rendah, koneksi komunitas yang lebih lemah, kualitas hubungan sosial dan kerja sama yang lebih rendah, dan perasaan tidak hormat antar individu. - yang semuanya dapat memicu kekerasan dan membahayakan stabilitas ekonomi dan politik (Wilkinson 2011). Memang daerah dengan koefisien Gini tinggi fi klien menunjukkan tingkat kejahatan kekerasan yang lebih tinggi. Buss dan Ahmed (2011) Menegaskan bahwa kekerasan di wilayah-wilayah ini seringkali memiliki a

"kelebihan" efek ke daerah berkembang lainnya, mengutip contoh con regional fi icts di Afrika Tengah Timur. Dalam beberapa kasus, penipu fi Konflik yang ditimbulkan oleh ketidakadilan dan kemiskinan dapat memburuk hingga tindakan ekstrim seperti terorisme internasional dan domestik. Burgoon (2006) berpendapat bahwa suatu negara ' Pengeluaran pemerintah, yang dapat membantu mengurangi hambatan politik dan ekonomi yang dihadapi oleh mereka yang tertindas, dikaitkan dengan pengurangan serangan teroris dan warga yang melakukan terorisme.

Frekuensi con yang diamati fi Konflik di daerah dengan tingkat ketidakadilan dan kemiskinan yang tinggi tidak diragukan lagi dipicu oleh tekanan psikologis dan fisik dari mereka yang tertindas. Penelitian telah menemukan hubungan langsung antara ketidaksetaraan dalam masyarakat dan efek psikososial negatif dari stres beracun, depresi, dan gejala psikotik (Piff dan Wilkinson). 2014). Selain itu, mereka yang berada di ujung bawah hierarki sosial menghadapi tantangan untuk mengakses layanan perawatan kesehatan, yang mengarah pada konsekuensi negatif bagi kesehatan mental dan fisik (Hug

2011). Penelitian menunjukkan bahwa dampak kemiskinan dan ketimpangan pada otak tidak hanya bersifat psikologis tapi juga pembangunan dan fisiologis.

Anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah menunjukkan perbedaan yang berbeda dalam kemampuan kognitif daripada teman sebayanya pada usia yang sangat muda, menciptakan disparitas dalam gangguan mental, pencapaian pendidikan, dan skor IQ, yang dapat menyebabkan kemunduran permanen dalam hasil pendidikan dan ekonomi (Sleek 2015). Terlepas dari klaim sebelumnya bahwa seorang anak ' Perkembangan terutama dibentuk oleh struktur keluarga, faktor utama yang secara negatif mempengaruhi perkembangan kognitif adalah kemiskinan jangka panjang (Nuf fi Yayasan tua 2011). Selain itu, jika anak-anak telah berkembang dalam lingkungan yang dikelilingi oleh kekerasan dan kerusuhan, pemindaian MRI menunjukkan koneksi saraf yang lemah dan perkembangan di bagian otak yang mengendalikan penilaian, kesadaran, etika, dan emosi (Hayasaki 2016). Kadar yang lebih rendah dari jaringan otak disebut materi abu-abu secara spesifik fi c area seperti hipokampus menghalangi anak-anak ' Kemampuan untuk mengikuti instruksi dan mencurahkan perhatian pada pembelajaran, menghasilkan nilai tes standar yang lebih rendah (Hayasaki 2016). Pertumbuhan otak yang terhambat ini secara biologis langsung

respons terhadap lingkungan yang penuh dengan stres beracun - sejenis berkelanjutan flight atau flight - dan menyarankan bahwa efek siklus kemiskinan dimulai jauh lebih awal daripada yang diperkirakan para ilmuwan dan bahwa program saat ini yang mempromosikan pengasuhan anak usia dini dan akses ke sumber daya juga harus mengarahkan sumber daya yang substansial untuk

melindungi anak-anak's sosio-emosional pengembangan.

Masa Depan Ekuitas Sosial

Seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh negara dan diperbaiki oleh negara, hubungan antara pemerintah dan kesetaraan, meskipun rumit secara politis, saling terkait erat. Karena potensi konsekuensi negatif yang serius dari ketimpangan dalam masyarakat, pemerintah harus peduli, dan memang harus peduli, tentang promosi keadilan dari banyak perspektif, termasuk politik, ekonomi, hukum, moral, dan kontra. Argumen manajemen ICT. Bahkan ketika pendekatan politik saat ini memperjuangkan tren privatisasi untuk menyediakan layanan (Ravitch 2016), bagaimana administrator dapat terus mempromosikan akuntabilitas dan komitmen terhadap kesetaraan akses, kualitas, dan hasil bagi semua warga negara?

Pertanyaan yang ada di hadapan kita luas, tetapi beberapa taktik konkret dapat digunakan untuk memajukan keadilan untuk masa depan administrasi publik. Pertama, administrator sendiri harus dididik dan dilatih tentang topik kesetaraan untuk menganalisis sistem dan kebijakan untuk dampak yang berbeda dan hambatan akses dan untuk mencari opsi kebijakan alternatif. Kurikulum dalam program administrasi publik harus menggarisbawahi pentingnya memeriksa masalah administrasi publik dan kebijakan menggunakan kerangka kerja keadilan, memeriksa keadilan dari perspektif akses, kualitas, keadilan prosedural, dan hasil (Larson et al. 2016). Sehubungan dengan memberikan pendidikan kepada administrator masuk, terpilih saat ini Para pejabat dan staf dapat diberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan mengenai pentingnya pertimbangan kesetaraan dan alat konkret untuk menginformasikan keputusan kebijakan (Johnson dan Svava 2011).

Sedangkan kesadaran dan pendidikan memberikan yang kokoh dasar untuk memeriksa masalah ekuitas, perlu untuk memperluas upaya ini selangkah lebih maju untuk meningkatkan pemahaman tentang spesifikasi alat dan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai ekuitas. Banyak kemajuan telah dicapai di bidang ini dalam beberapa tahun terakhir. Kerangka keadilan sosial telah membantu menciptakan permintaan untuk mengidentifikasi, definisi, dan mengumpulkan sumber data yang sebelumnya tidak tersedia informasi. Svava menyarankan administrator dapat memanfaatkan pertanyaan yang diajukan oleh kerangka keadilan sosial dan data yang dihasilkan untuk melakukan

"persediaan ekuitas" di berbagai tingkat pemerintahan, dari operasi dan layanan departemen kecil hingga tingkat yurisdiksi yang lebih meninjau hasil di seluruh departemen. Beberapa yurisdiksi teladan telah menciptakan ekuitas "toolkit" atau "kartu skor" berfungsi sebagai templat yang berguna untuk menilai kinerja dan proposal - misalnya, Seattle Racial Equity Toolkit (Johnson dan Svava 2011) atau King County Office Ekuitas dan Keadilan Sosial's "daftar penentu keadilan sosial" (Larson dkk.

2016). Selain memperluas landasan yang diberikan oleh contoh-contoh ini, administrator juga dapat meningkatkan alat pengukuran dengan mencari bantuan dari peneliti dan ekonom untuk mengurangi tantangan pengukuran dan evaluasi seperti data yang tidak memadai atau terdesentralisasi, alat dan metodologi pengukuran yang buruk, serta kegugupan dan keraguan tentang evaluasi di antara kepemimpinan.

Setelah administrator memiliki pengetahuan untuk mencari kemungkinan ketidakadilan ini dan mengidentifikasinya, langkah penting berikutnya adalah menghasilkan keterpaparan publik yang luas dan perhatian seputar ketidakadilan konsekuensi negatif. Bahaya politik, ekonomi, dan moral dari ketidakadilan dalam suatu masyarakat harus menjadi perhatian publik f-

pejabat dan warga negara individu sama. Melalui kolaborasi dengan media, pernyataan publik, laporan kepada Para pejabat, dan tindakan lainnya, administrator dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kesetaraan dan terus meningkatkan kesadaran tentang dampak ketidakadilan, yang pada akhirnya memberi pemangku kepentingan pengetahuan dan alat untuk menormalkan perhatian pada masalah kesetaraan dan menanamkan kesetaraan dalam pertimbangan kebijakan.

Referensi

- Adler M (1981) Enam gagasan hebat. Collier Books, New York
- Bartels L (2002) Melampaui penghitungan berjalan: Bias partisan dalam persepsi politik. *Polit Behav* 24 (2): 117 - 150
- Boyd G (2011) Perang narkoba adalah Jim Crow Baru. Laporan NACLA tentang Amerika. Serikat Kebebasan Sipil Amerika. Diterima dari <https://www.aclu.org/other/drug-war-new-jim-crow>
- Brunet J (2011) Kesetaraan sosial dalam peradilan pidana. Di: Johnson N, Svara J (eds) Keadilan untuk semua. ME Sharpe, Armonk, hal 165 - 187
- Burgoon B (2006) Tentang Kesejahteraan dan Teror: Kesejahteraan Sosial kebijakan dan akar politik-ekonomi terorisme. *J Con fl Resolut* 50 (2): 176 - 203
- Buss T, Ahmed U (2011) Kesetaraan dan pembangunan sosial. Masuk: Johnson N, Svara J (eds) Justice for all. ME Sharpe, Armonk, hal 56 - 76
- CEPAL (2015) Annex IX: mengukur kemiskinan dan ketimpangan-ity dan indikator untuk mengidentifikasi kelompok berisiko. Diterima dari http://www.cepal.org/sites/default/files/project/files/annex_9_measuring_poverty_and_in_equality.pdf
- Drug Policy Alliance (2015) Statistik perang narkoba. Diambil dari <http://www.drugpolicy.org/drug-war-statistics>
- Falk J, Hampton G, Hodgkinson A, Parker K, Rorris A (1993) Kesetaraan sosial dan lingkungan perkotaan: laporan ke Badan Perlindungan Lingkungan Persemakmuran. Otoritas Perlindungan Lingkungan Persemakmuran, Pencetak Pemerintah Persemakmuran, Canberra
- Farkas G (2003) Kesenjangan rasial dan diskriminasi di pendidikan: apa yang kita ketahui, bagaimana kita mengetahuinya, dan apa yang perlu kita ketahui? *Ajarkan Coll Rec* 105 (6): 1119 - 1146
- Frederickson HG (1990) Administrasi publik dan sosial keadilan. *Adm Umum Rev* 50: 228 - 237
- Frederickson HG (2005) Keadaan keadilan sosial di Administrasi publik Amerika. *Natl Civ Rev* 94 (4): 31 - 38
- Gershenson S (2015) The mengkhawatirkan efek rasial ketidaksesuaian dengan harapan guru. Brookings. Diambil dari <https://www.brookings.edu/blog/coklat-tengah-papan-tulis/2015/08/18/the-alarming-efek-of-rasial-ketidakcocokan-pada-harapan-guru/>
- Glaeser E, Resseger M, Tobio K (2011) Ketimpangan perkotaan. Masuk: Johnson N, Svara J (eds) Justice for all. ME Sharpe, Armonk, hal 76 - 100
- Gooden S (2014) Ras dan kesetaraan sosial: area gugup pemerintah. AKU Sharpe, Armonk
- Hart D (1974) Kesetaraan sosial, keadilan, dan kesetaraan administrator. *Laksamana Umum Rev* 34 (1): 3 - 11
- Hayasaki E (2016) Bagaimana kemiskinan mempengaruhi otak. *Newsweek*. Diterima dari <http://www.newsweek.com/2016/09/02/bagaimana-kemiskinan-mempengaruhi-otak-493239.html>
- Holzer, H. (2007). Biaya jaminan: efek penahanan-asi pada pekerjaan dan pendapatan pekerja muda. IZA DP No. 3118
- Hug R (2011) Kesetaraan sosial, kesehatan, dan perawatan kesehatan. Di: Johnson N, Svara J (eds) Keadilan untuk semua. ME Sharpe, Armonk, hal 121 - 165
- Johnson N, Svara JH (2011) Keadilan untuk semua: mempromosikan keadilan sosial dalam administrasi publik. *Tren transformasional dalam pemerintahan & demokrasi*. AKU Sharpe, Armonk
- Kenworthy L, Smeeding T (2013) GINI: Growing Inequalities ' Dampak, Laporan Negara Amerika Serikat. Diterima dari <http://gini-research.org/synal/US.pdf?1370077377>
- Kraus M, Anderson C, Callaghan B (2015) Ketidaksetaraan politik: peringkat kelas sosial dan partisipasi politik. Tersedia di SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2600107>
- Larson S, Jacob B, Butz E (2016) Menghubungkan keadilan sosial dan pengukuran kinerja: seorang praktisi ' peta jalan. San Antonio, TX, 20 Mei - 22
- National Academy of Public Administration (2000) Standing Panel on Social Equity in Governance mengeluarkan kertas dan rencana kerja, November. www.napawash.org/aa_social_equity/paper_publications.html
- Laporan Disparitas & Kualitas Kesehatan Nasional (2007) Departemen Kesehatan & Layanan Kemanusiaan AS. Diterima dari <https://archive.ahrq.gov/qual/qdr07.htm>
- Norman-Major K (2012) Menyeimbangkan empat Es; atau bisakah kita mencapai kesetaraan untuk keadilan sosial dalam administrasi publik? *J Public Aff Educ* 17 (2): 233 - 252
- Norman-Major K, Wooldridge B (2011) Menggunakan framing teori untuk membuat kasus ekonomi untuk keadilan sosial: peran pengusaha kebijakan dalam membimbing ulang perdebatan. Masuk: Johnson N, Svara J (eds) Justice for all. ME Sharpe, Armonk, hal 209 - 228
- Nuffield Foundation (2011) Children ' perkembangan kognitif Hal ini dipengaruhi oleh kemiskinan jangka panjang, tetapi BUKAN oleh ketidakstabilan keluarga. Diterima dari <http://www.nuffieldfoundation.org/news/children%E2%80%99s-cognitive-perkembangan-jangka-lama-kemiskinan-bukan-keluarga-ketidakstabilan>
- Piff P, Wilkinson R (2014) TED: apa pengaruh ketidaksetaraan tubuh dan pikiran kita? Diterima dari <http://ideas.ted.com/apa-ketidaksetaraan-lakukan-untuk-tubuh-dan-pikiran-kita-sa-sosial-psikolog-dan-seorang-epidemiologi-mendiskusikan/>
- Ravitch D (2016) When public go private, as Trump ingin: apa yang terjadi? Diterima dari <http://www.nybooks.com/articles/2016/12/08/when-public-goes-pribadi-as-truf-ingin-apa-terjadi/>
- Rawls J (1971) Teori keadilan. Belknap Press dari Harvard University Press, Cambridge, MA
- Rousseau JJ (1992) Wacana tentang asal usul ketimpangan. Hackett Publishing Co., Indianapolis
- Rutledge P (2002) Beberapa un fi bisnis selesai di depan umum administrasi. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Masyarakat Amerika untuk Administrasi Publik, Phoenix. www.napawash.org/about_a_rutledge_lecture.html
- Saez E (2015) Mencoloknya lebih kaya: evolusi puncak pendapatan di Amerika Serikat. Diterima dari <http://eml.berkeley.edu/~saez/saez-UStopincome-2013.pdf>

Blog SCOTUS (2010) Citizens United v. Federal Election

Komisi. Diterima dari <http://www.scotusblog.com/case-files/kasus/warga-bersatu-v-federal-pemilu-Komisi/>

Seth S, Conconi A, Alkire S (2014) Multidimensi

indeks kemiskinan 2014: catatan metodologis singkat dan hasil.

Oxford Poverty and Human Development Initiative. Diterima dari <http://www.ophi.org/publications/Global-MPI-2014-Brief-Methodologi-peran-ras/408085/>

[cal-Catatan-dan-Hasil.pdf](#)

Shafritz J, Russell EW, Borick CP (2007) Memperkenalkan publik administrasi, edisi ke-5. Pearson Longman, New York

Sleek S (2015) Bagaimana kemiskinan mempengaruhi otak dan perilaku.

Ilmu Psikologi. Diterima dari <http://www.psychscience.org/observer/how-poverty-affect-s-otak-dan-perilaku#.WGbZmfkrLIV>

Stiefel L, Schwartz A, Ellen I (2011) Kesenjangan skor tes ras.

Masuk: Johnson N, Svara J (eds) Justice for all.

ME Sharpe, Armonk, hal 121 - 165

Stilwell V, Lu W (2015) 10 kota besar paling timpang di

Amerika. Pasar Bloomberg. Diterima dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-10/the-10-kota-besar-paling-tidak-setara-di-Amerika>

Svara J, Brunet J (2005) Kesetaraan sosial adalah pilar publik

administrasi. J Public Aff Educ 11 (3): 253 - 258 Turner A (2016)

Kasus bisnis untuk persamaan ras.

National Civic Review 105 (1): 21 - 29 White G (2015) Bagaimana balapan masuk fl memengaruhi pendanaan sekolah. Itu

Atlantik. Diterima dari <http://www.theatlantic.com/bisnis/archive/2015/09/publik-scholarship-funding/408085/>

<http://www.ophi.org/publications/Global-MPI-2014-Brief-Methodologi-peran-ras/408085/>

Wilkinson R (2011) TED Talks: bagaimana ketimpangan ekonomi

merugikan masyarakat. Diterima dari https://www.ted.com/bicara/richard_wilkinson

Williams D, Collins C (2001) Segrega tempat tinggal ras

tion: penyebab mendasar dari perbedaan ras dalam kesehatan. Rep Kesehatan

Masyarakat 116 (5): 404 - 416

Wooldridge B (2016) Komunikasi Pribadi Wooldridge B, Gooden S

(2009) Epik kesetaraan sosial.

Adm Theory Prax 31 (2): 222 - 234

Bank Dunia (2006) Laporan pembangunan dunia: ekuitas dan

pengembangan. Diterima dari <http://dokumen.worldbank.org/curated/en/435331468127174418/pdf/322040World0Development0Report02006.pdf>

[322040World0Development0Report02006.pdf](http://dokumen.worldbank.org/curated/en/435331468127174418/pdf/322040World0Development0Report02006.pdf)

Indeks GINI Bank Dunia (2016). Diterima dari <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI>

<http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI>